

DINAMIKA KEBIJAKAN INFLASI DAN SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA PERIKANAN INDONESIA

Ristanti Akseptori

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

ristanti@ppns.ac.id

R.A. Norromadani Yuniati

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

norromadani.y@ppns.ac.id

Danis Maulana

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

danis@ppns.ac.id

Wafi Iqbal Wahyutama

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

wafiwahyutama@gmail.com

Abstract

Gross Domestic Product (GDP) as a representation of Indonesia's fisheries performance showed a positive trend from 2011 to 2020. Supportive economic policies are needed to make the fisheries sector the prime mover of national economic development. One of the economic policies is monetary policy. This study aimed to analyze the effect of monetary policy through inflation and interest rates on fishery GDP. The analytical methods used are the Cointegration test and Vector Error Correction Model (VECM). Secondary data were obtained from the Central Statistics Agency, the Indonesian Bank, and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries for the 2011-2020 quarterly. The results showed that inflation and interest rates had no significant effect on Fishery GDP in the short term. Low and stable inflation growth in the long term affects Fishery GDP. Interest Rate did not affect Fishery GDP in the short and long term. This research implies that monetary policy through inflation and interest rates needs to be considered by Bank Indonesia in maintaining macroeconomic stability and financial system stability, as well as encouraging economic growth while considering the dynamics of the global and domestic economy.

Keywords: fishery GDP; inflation; interest rates.

PENDAHULUAN

Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.491 yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (KKP, 2019). Indonesia merupakan poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (*the global supply chain system*). Hal ini terjadi karena secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada diantara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan demikian Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar. FAO (2020) menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat dua setelah China sebagai negara dengan jumlah produksi perikanan tangkap terbesar di tahun 2018, dan hingga tahun 2030 Indonesia diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan total produksi ikan sebesar 18,2%, dan budidaya perikanan mengalami peningkatan sebesar 42,1%. Proyeksi ini dilakukan dengan asumsi khusus tentang: masa depan lingkungan makro ekonomi; aturan perdagangan internasional dan tarif; frekuensi dan efek peristiwa padasumber daya; tidak adanya efek iklim parah lainnya seperti tsunami, badai tropis (siklon, angin topan dan topan), banjir dan penyakit ikan yang muncul; langkah-langkah pengelolaan perikanan, termasuk aturan atas tangkapan; dan tidak adanya guncangan pasar.

PDB perikanan merupakan salah satu indikator penting yang diukur dalam kinerja sektor perikanan. Produk Domestik Bruto (PDB) merujuk Mankiw (2009) merupakan nilai barang dan jasa yang

diproduksi di dalam negarayang bersangkutan untuk kurun waktu tertentu. Sehingga PDB Perikanan merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya. PDB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Soemokaryo (2001) menerangkan bahwa secara teoritis pengembangan perikanan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Keterkaitan umum antara sumber daya perikanan, produksi, usaha penangkapan, kebijakan pemerintah, dan pasar akan berpengaruh kepada GDP yang selanjutnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan ekonomi yang mendukung sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan serta menjadikan sektor perikanan sebagai penggerak utama pembangunaneкономи nasional. Dalam hal ini (KKP, 2014) menyatakan bahwa diperlukannya upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan dengan didukung oleh kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif. Salah satu kebijakan ekonomi adalah melalui kebijakan moneter. Penelitian ini membahas tentang pengaruh kebijakan moneter melalui kebijakan inflasi dan suku bunga terhadap kinerja sektor perikanan yang direpresentasikan melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan. Urgensi penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pengaruh kebijakan pemerintah khususnya kebijakan moneter terhadap peningkatankinerja sektor perikanan, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan maupun membaca situasi di masa mendatang. Metode yang digunakan adalah *cointegration test* dilanjutkan dengan *Vector Error Correction Model* (VECM) dengan data triwulan pada periode 2011-2020.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kebijakan Moneter

Budiyanti (2014) menyatakan kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dengan tujuan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kebijakan moneter adalah jumlah uang beredar (*money supply*), inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan ekspektasi masyarakat. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah (Natsir, 2014).

Inflasi

Inflasi diartikan sebagai gejala kenaikan harga yang berlangsung terus menerus (Rosyidi, 2017). Tingkat inflasi dihitung dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Jika IHK menunjukkan kecenderungan naik selama suatu jangka waktu tertentu, maka itu berarti terjadi inflasi, namun jika kecenderungannya adalah turun maka terjadi deflasi. Karakteristik inflasi dapat digambarkan melalui penjelasan mengenai faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi, inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan, sisi penawaran maupun ekspektasi (Natsir, 2014).

Suku Bunga

Boediono (1994) menyatakan bahwa tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (*loanable funds*) yang merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Budiono (1994) menyatakan bahwa pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga (secara makro) yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Bungamerupakan imbalan atas ketidaknyamanan karena melepas uang sehingga bunga adalah harga kredit.

Teori Klasik tentang Tingkat Bunga.

Menurut teori Klasik, tingkat bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (*loanable funds*). Tingkat bunga adalah salah satu indikator dalam memutuskan apakah seseorang akan melakukan

investasi atau menabung (Howells & Bain, 1998). Simpanan merupakan fungsi dari tingkat bunga, artinya bahwa semakin besar tingkat bunga maka semakin mendorong keinginan individu untuk berinvestasi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga maka menurunkan minat individu untuk menyimpan dananya. Dalam kaitannya dengan kinerja perikanan Indonesia, tingkat bunga yang ditetapkan oleh pemerintah dapat menjadi stimulus atau sebaliknya dalam perubahan Produk Domestik Bruto melalui jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Jika kebijakan suku bunga berperan sebagai stimulus, hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

PDB

Sukirno (2008) menyatakan bahwa pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan sehingga pada dasarnya PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu.

Pengaruh antar Variabel

Menurut Mishkin (2016) stabilitas harga merupakan salah satu tujuan dari suatu kebijakan moneter. Stabilitas harga merupakan kondisi di mana harga-harga stagnan/ stabil pada nilai tertentu dan tidak berfluktuasi. Semakin harga barang di suatu negara stabil maka inflasi akan turun. Inflasi umumnya disebabkan oleh sisi permintaan (*aggregate demand*) dan sisi penawaran (*aggregate supply*). Menurut (Natsir, 2014) Inflasi yang disebabkan oleh permintaan, cenderung diikuti dengan kenaikan *output* (PDB) sejalan dengan kenaikan harga, sedangkan jika inflasi disebabkan oleh penawaran, cenderung diikuti dengan penurunan *output* (PDB) yang mengarah pada resesi ekonomi (berkurangnya aktivitas ekonomi). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mashinini *et al* (2019), dalam jangka pendek inflasi akan berpengaruh signifikan terhadap PDB Agrikultur dengan koefisien negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa inflasi tersebut disebabkan oleh sisi penawaran sehingga berdampak negatif terhadap PDB. Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H1: Inflasi berpengaruh terhadap PDB perikanan.

Perubahan nilai uang yang salah satunya ditunjukkan oleh inflasi sangatlah penting karena sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Jika terjadi kenaikan harga-harga umum (inflasi), maka respon kebijakan bank sentral adalah menaikkan tingkat suku bunga acuannya (*BI Rate*). Kenaikan suku bunga tersebut akan memengaruhi suku bunga di pasar uang yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap PDB (Natsir, 2014). Kenaikan tingkat suku bunga berpengaruh langsung secara negatif terhadap komponen permintaan agregat (konsumsi, investasi dan ekspor netto). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tajerin (2005) bahwa peningkatan suku bunga akan memengaruhi PDB Perikanan, peningkatan suku bunga akan menurunkan investasi dan ekspor netto dan pada akhirnya akan menurunkan PDB Perikanan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H2: Suku bunga berpengaruh terhadap PDB perikanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis ekonometrika untuk menjelaskan pengaruh antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Analisis ekonometrika dilakukan untuk menguji hipotesis menggunakan model analisis ekonomi *Vector Error Correction Model* (VECM). Populasi yang diambil berdasarkan data *time series* triwulan dalam tahun 2011-2020 berupa data PDB Perikanan yang diakses melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan total data sebanyak 40, data inflasi diakses melalui www.bps.go.id, dan data suku bunga diakses melalui www.bi.go.id. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh sehingga seluruh anggota populasi menjadi sampel dalam penelitian.

Berikut merupakan tahapan analisis data yang dilakukan menggunakan software Eviews 10:

Uji stasioneritas data dilakukan melalui pengujian ada tidaknya unit root dalam variabel dengan uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF) dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) 5%. Jika dalam uji stasioneritas pada tingkat level menunjukkan nilai ADF yang lebih besar dari tingkat signifikansi (α) 5%, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak stasioner pada tingkat level. Jika data tidak stasioner pada tingkat level, langkah selanjutnya adalah melakukan uji akar unit (Unit root) pada tingkat *first difference*. Jika dalam uji stasioner pada tingkat *first difference* menunjukkan nilai ADF kurang dari tingkat signifikansi (α) 5%, maka data lolos uji akar unit pada tingkat *first difference* atau stasioner pada tingkat *first difference*. Jika dari hasil uji *first different* ternyata data runtut waktu (*time series*) belum stasioner, maka dilakukan *differencing* kedua (*second differencing*) (Basuki & Prawoto, 2015).

Penentuan panjang lag optimum. Basuki & Prawoto (2015) menyatakan bahwa tahap penentuan lag merupakan tahapan penting karena bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan variabel dependen dalam merespon perubahan variabel lain yang dipengaruhi. Pengujian panjang lag optimal sangat berguna untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam *system*. Dengan didapatkannya lag optimal diharapkan tidak muncul lagi masalah autokorelasi. Panjang lag optimal akan dicari dengan menggunakan kriteria informasi yang tersedia. Kandidat lag yang terpilih adalah panjang lag menurut kriteria *Likelihood Ratio* (LR), *Final Prediction Error* (FPE), *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Information Criterion* (SC), dan *Hannan-Quin Criterion* (HQ).

Uji stabilitas. Uji ini merupakan syarat agar shock tunggal (*impulse*) mendekati kestabilan jangka panjang. Peneliti ekonomi umumnya percaya bahwa variabel ekonomi memiliki keseimbangan pada jangka panjang pada tingkat tertentu (Ekananda, 2016).

Uji Cointegrasi menggunakan pendekatan Johansen dengan membandingkan *trace statistik* dengan *critical value* dan membandingkan nilai maksimum *eigenvalue* dengan *critical value*. Menurut Basuki & Prawoto (2015) apabila nilai *trace statistik* lebih besar dari nilai *critical value* dan nilai maksimum *eigenvalue* lebih besar dari nilai *critical value* maka variabel yang diamati saling berkointegrasi atau terdapat hubungan jangka panjang. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh jangka panjang pada variabel yang diteliti. Jika terbukti terdapat kointegrasi, maka tahapan *Vector Error Correction Model* (VECM) dapat dilanjutkan. Namun jika tidak terbukti, maka VECM tidak bisa dilanjutkan.

Vector Error Correction Model (VECM). Melalui hasil VECM didapatkan hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel PDB Perikanan, inflasi dan suku bunga. Pada estimasi ini, PDB Perikanan merupakan variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah inflasi dan suku bunga. Cara membaca estimasi VECM adalah dengan membandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel (Basuki & Prawoto, 2015). Dalam penelitian ini, nilai t-tabel adalah 2,03011. Apabila t-statistik lebih besar dari t-tabel maka variabel independen secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Stationer

Hasil uji stasioner pada penelitian ini diperoleh bahwa seluruh variabel yang diuji yaitu PDB Perikanan (0,5563), inflasi (0,7953), suku bunga (0,3461) menunjukkan hasil tidak stasioner pada tingkat level. Hal tersebut disebabkan nilai probabilitas masing-masing variabel lebih besar dari $\alpha=5%$ (0,05). Oleh karena itu data tersebut harus dilakukan *differencing* untuk memperbaiki gejala non stasioner pada tingkat level. Setelah seluruh variabel diuji di tingkat *first different*, didapatkan hasil bahwa hanya variabel suku bunga (0,3461) yang telah stasioner pada tingkat *first different* karena nilai probabilitasnya kurang dari $\alpha=5%$ (0,05). Sedangkan variabel PDB Perikanan (0,0912) dan inflasi (0,1534) masih belum stasioner pada tingkat *first different*, karena nilai probabilitasnya lebih dari $\alpha=5%$ (0,05) sehingga seluruh variabel diuji pada tingkat *second different*. Hasil pengujian di tingkat *second different* adalah seluruh variabel stasioner dengan tingkat probabilitas 0,0000 yang artinya

tingkat probabilitas seluruh variabel sudah kurang dari $\alpha=5\%$ (0,05). Setelah seluruh variabel telah dalam kondisi derajat stationeritas di tingkat *difference* yang sama maka dapat dilakukan tahap pengujian pengujian selanjutnya.

Hasil Penentuan Panjang Lag Optimum

Tabel 1 menunjukkan hasil penentuan panjang lag optimum.

Tabel 1.
HASIL PENENTUAN PANJANG LAG OPTIMUM

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	306.4199	NA	5.78e-14	-16.29297	-16.07528*	-16.21622
1	340.4632	57.04545*	3.59e-14*	-16.78179*	-15.47564	-16.32131*
2	356.4987	22.53637	6.31e-14	-16.29722	-13.90262	-15.45301

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistik (each test at 5% level) FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Pada Tabel 1, panjang lag optimum yang digunakan adalah 1. Pada panjang lag 1, ada 4 kriteria yang direkomendasi yaitu kriteria *Likelihood Ratio* (LR), *Final Prediction Error* (FPE), *Akaike Information Crition* (AIC), dan *Hannan-Quin Crition* (HQ). Sedangkan Panjang lag 0 hanya direkomendasi oleh kriteria *Schwarz Information Crition* (SC). Panjang lag 2 tidak direkomendasi oleh kriteria apapun.

Hasil Uji Stabilitas

Hasil uji stabilitas pada penelitian ini diketahui bahwa seluruh nilai modulus kurang dari satu (modulus < 1) yang menunjukkan bahwa variabel variabel memiliki keseimbangan pada jangka panjang pada tingkat tertentu.

Hasil Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya kointegrasi atau hubungan jangka panjang antar variabel. Dari hasil pengujian diketahui bahwa nilai *trace statistik* lebih besar dari nilai *critical value* pada $\alpha=5\%$ (0,05), dan *trace test* mengindikasikan bahwa ada 3 variabel yang terkointegrasi di level $\alpha=5\%$ (0,05). Sedangkan pada *Max-eigenvalue test* juga didapat nilai maksimum *eigenvalue* di atas nilai *critical value* pada $\alpha=5\%$ (0,05), dan ada 3 variabel yang terkointegrasi pada tingkat $\alpha=5\%$ (0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antar variabel yang dibuktikan ada 3 variabel yang terkointegrasi pada setiap test, yaitu *trace test* dan *max-eigenvalue test*, sehingga penggunaan *Vector Error Correction Model* (VECM) dapat dilakukan.

Hasil Vector Error Correction Model (VECM)

Tabel 2 merupakan hasil VECM jangka pendek untuk melihat pengaruh jangka pendek variabel independen terhadap variabel dependennya.

Tabel 2.
HASIL VECM JANGKA PENDEK

Error Correction:	D(PDB PERIKANAN)	Keterangan	Hasil
D (Inflasi (-1))	0.019902 (0.02313)	perubahan	
	[0.86041]	t statistik	Tidak signifikan
D (Suku Bunga (-1))	0.084611 (0.06293)	perubahan	
	[1.34450]	t statistik	Tidak signifikan

Sumber: hasil olah data (2022)

Berdasarkan hasil estimasi jangka pendek pada Tabel 2, tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan dalam jangka pendek terhadap PDB Perikanan pada lag (-1) yang artinya perubahan pada variabel independen di 1 triwulan sebelumnya tidak memengaruhi PDB Perikanan dalam jangka pendek. Nilai t statistik variabel inflasi (0,86041) dan suku bunga (1,34450) berada di bawah nilai t tabel (2,03011). Variabel inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDB Perikanan dalam jangka pendek.

Tabel 3 menunjukkan hasil VECM jangka panjang untuk melihat pengaruh jangka panjang variabel independen terhadap variabel dependennya.

Tabel 3.
HASIL VECM JANGKA PANJANG

Cointegrating Eq:	CointEq1	Keterangan	Hasil
PDB_Perikanan (-1)	1.000000		
Inflasi (-1)	0.064527 (0.03170)	perubahan	positif
	[2.03537]	t stastistik	Signifikan
Suku Bunga (-1)	0.040610 (0.05278)	perubahan	positif
	[0.76939]	t stastistik	Tidak Signifikan

Sumber: hasil olah data (2022)

Berdasarkan Tabel 3, variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap PDB Perikanan dalam jangka Panjang adalah inflasi (2,03537). Nilai t statistik variabel inflasi berada di atas nilai t tabel (2,03011). Inflasi berpengaruh signifikan terhadap PDB Perikanan dalam jangka Panjang dengan koefisien positif. Peningkatan 1% inflasi akan meningkatkan PDB Perikanan sebesar 0,064527%. Sedangkan variabel suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Perikanan dalam jangka panjang karena nilai t statistik suku bunga (0,76939) kurang dari nilai t tabel (2,03011).

Pengaruh Inflasi terhadap PDB Perikanan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Perikanan dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, inflasi berpengaruh signifikan terhadap PDB Perikanan.

Dalam jangka pendek, tekanan inflasi yang timbul tidak memberikan dampak bagi PDB Perikanan. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan tingkat inflasi tahun 2011-2020 masih dibawah 10% dan masih dikategorikan sebagai inflasi yang aman. Serta kebijakan pemerintah yang berhasil menekan laju inflasi, menyebabkan kondisi perekonomian yang tidak terpuruk tajam (kondisi stabil). Hal tersebut terbukti di dalam penelitian ini yang menunjukkan hasil tidak berpengaruhnya inflasi dalam jangka pendek terhadap PDB Perikanan selama periode pengamatan.

Menurut Natsir (2014) Inflasi umumnya disebabkan oleh sisi permintaan (*aggregate demand*) dan sisi penawaran (*aggregate supply*). Peningkatan permintaan agregat akan mendorong peningkatan harga-harga, hal tersebut merupakan inflasi karena tekanan permintaan (*demand full inflation*). Inflasi karena tekanan permintaan timbul dikarenakan adanya interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka panjang. Inflasi karena dorongan biaya (*cost push inflation*), merupakan inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa, sehingga produsen harus menaikkan harga supaya mendapatkan keuntungan (laba) dan kegiatan produksi bisa terus berlanjut (*sustainable*).

Berdasarkan hasil pengujian, nilai inflasi berkoefisien positif terhadap PDB Perikanan. Pertumbuhan inflasi tahun 2011-2020 cenderung dapat dikendalikan walaupun ada beberapa tekanan yang terjadi pada tahun tertentu. Inflasi disebabkan dari sisi permintaan (*aggregate demand*) yang mengindikasikan adanya kenaikan permintaan yang menyebabkan terjadinya kenaikan inflasi, Tingginya permintaan akan menyebabkan produsen menaikkan harga supaya mendapat keuntungan

yang lebih banyak. Hal ini sesuai dengan kondisi sektor perikanan tahun 2011-2020. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021) menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk perikanan ditandai dengan tingkat konsumsi perikanan yang terus meningkat dari tahun 2011-2020. Hal ini terlihat dari naiknya tingkat konsumsi ikan di tahun 2011 sebanyak 32,65% menjadi 56,39% di tahun 2020. Fakta ini sejalan dengan Rosyidi (2017) yang menyatakan bahwa tingkat PDB yang meningkat akan menyebabkan tingkat konsumsi meningkat.

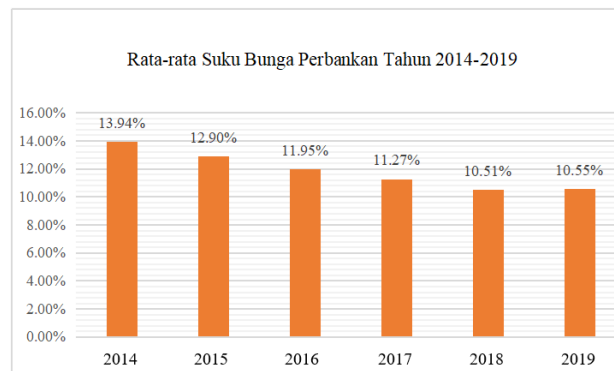
Menilik ke kondisi inflasi berdasarkan Laporan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2011-2020 (www.bi.go.id), inflasi cenderung stabil di angka pertumbuhan yang rendah, namun tahun 2013, inflasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga puncaknya menyentuh 8,6% pada kuartal ketiga. Menurut laporan ekonomi Indonesia tahun 2013 (BI, 2013) konsumsi rumah tangga yang menurun diakibatkan oleh peningkatan inflasi tahun 2013, membuat pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara (BLSM) untuk masyarakat menengah ke bawah agar mampu meredam penurunan daya beli masyarakat. Keinginan untuk melakukan konsumsi menimbulkan permintaan atas barang dan jasa yang diproduksi. Hal ini sesuai dengan teori menurut Rosyidi (2017) bahwa dengan pemerintah mengeluarkan pembayaran langsung kepada masyarakat, maka kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa juga akan meningkat. Selain itu, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) (www.kkp.go.id) dinilai dapat meningkatkan tingkat konsumsi ikan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) GEMARIKAN merupakan organisasi masyarakat dan profesional untuk bersama-sama membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengonsumsi ikan. Tujuannya, untuk meningkatkan permintaan masyarakat atas produk perikanan dan meningkatkan asupan gizi yang berasal dari ikan, sehingga berimplikasi pada peningkatan konsumsi ikan nasional. Hal ini sejalan dengan Mankiw (2009) bahwa keinginan untuk membeli lebih banyak barang dan jasa menyebabkan pergerakan simultan dalam penawaran dan permintaan yang akan meningkatkan output perekonomian tanpa memberikan tekanan pada inflasi, sehingga perekonomian dapat mengalami pertumbuhan jangka panjang dan tingkat inflasi yang stabil. Tekanan inflasi yang masih dalam batasan kurang dari 10% per tahun/ inflasi ringan menurut Abdi (2019) dan dapat dikendalikan di tahun-tahun berikutnya serta konsumsi perikanan yang terus meningkat setiap tahun membuat PDB Perikanan juga meningkat menuju pertumbuhan jangka panjang. Menurut Rosyidi (2017) kecepatan inflasi tidak melebihi 10% per tahun dikategorikan sebagai *creeping inflation* dan masih dalam batas yang aman.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mashinini *et al.* (2019) bahwa inflasi berpengaruh terhadap PDB Agrikultur. Salim & Ahmed (2019) juga membuktikan bahwa inflasi berpengaruh terhadap PDB. Implikasi teoritis dan praktis dari penelitian terdahulu di bidang agrikultur membuktikan bahwa inflasi yang dapat dijaga dan stabil akan menyebabkan kestabilan harga, baik untuk kestabilan harga produksi sektor agrikultur dan juga harga yang stabil terhadap output produk agrikultur yang dihasilkan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini, bahwa tingkat inflasi yang masih dalam batas aman dan dapat dikendalikan di tahun-tahun berikutnya dalam jangka panjang akan menyebabkan kestabilan harga dan menjaga daya beli masyarakat terhadap produk perikanan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan PDB Perikanan.

Pengaruh Suku Bunga terhadap PDB Perikanan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Perikanan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pembangunan sektor perikanan tidak terlepas dari kebijakan moneter pemerintah yang salah satunya adalah suku bunga. Selain persoalan bahan baku dan infrastruktur, sektor perikanan sulit berkembang karena tingginya suku bunga kredit perbankan. Menurut Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI) Herman Jaya yang dilansir dari (ekonomi.bisnis.com) “Tingginya suku bunga berdampak pada bisnis perikanan yang tidak efisien sehingga sulit bersaing dengan negara lain”. Bunga kredit perbankan yang tinggi mengakibatkan hanya sedikit nelayan dan pelaku usaha perikanan skala kecil dan menengah mendapat kredit perbankan. Menurut pernyataan Ketua Umum Forum Pemerhati Perikanan Indonesia yang dilansir melalui (ekonomi.bisnis.com) pada 2012 suku bunga kredit sektor perikanan Indonesia

masih cukup tinggi di kisaran 12%-16% jika dibandingkan dengan Cina dan Thailand 4%-8%, Australia 3%, Malaysia 2%-4% dan Jepang 0,5%. Hal ini memberatkan bisnis perikanan sehingga sulit mendorong perkembangannya. Gambar 1 menampilkan suku bunga perbankan pada sektor perikanan.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019 (keuangan.kontan.co.id)

Gambar 1. RATA-RATA SUKU BUNGA PERBANKAN SEKTOR PERIKANAN TAHUN 2014-2019

Menurut Boediono (1994) tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Menurut Mankiw (2009) jumlah barang investasi yang diminta tergantung pada tingkat bunga. Agar investasi dapat menguntungkan, pengembaliannya (*return*) (pendapatan dari peningkatan produksi barang dan jasa di masa depan) harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk pinjaman. Jika tingkat bunga naik, lebih sedikit proyek investasi yang menguntungkan, dan jumlah barang investasi yang diminta turun. Berdasarkan penelitian terdahulu Muroyiwa *et al* (2014) dan berita seputar sektor perikanan memperlihatkan bahwa bunga kredit yang diberikan oleh perbankan tidak berubah secara signifikan dan cenderung masih tinggi dan di atas 10%, menyebabkan sektor perikanan enggan untuk memanfaatkan kredit perbankan sebagai proyek investasi yang menguntungkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tajerin (2005) kebijakan yang berkaitan dengan tingkat suku bunga tergolong masih tinggi. Hal ini memengaruhi daya saing ekspor komoditas perikanan Indonesia dengan negara lainnya karena negara pesaing seperti Thailand dan Jepang memberikan kredit dengan bunga yang jauh lebih rendah. Hal tersebut juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Asnawi (2007) bahwa tingkat suku bunga yang berlaku masih tergolong tinggi untuk usaha di bidang perikanan, dan belum mampu mendorong investor untuk menanamkan modalnya.

Selain melalui kredit perbankan, pembiayaan sektor perikanan juga didapat melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut (KKP, 2020) investasi yang berasal dari PMA merupakan kontribusi perusahaan swasta asing (menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing) terhadap pembangunan kelautan dan perikanan, sedangkan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta dalam negeri (menggunakan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan/atau tenaga kerja lokal) terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. Mengutip www.bkpm.go.id, bahwa realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan sektor tahun 2016, 2018 dan 2020 pada sektor perikanan memiliki nilai investasi yang sangat kecil dibanding dengan sektor lainnya. Perikanan yang tergabung dalam kelompok sektor primer, menjadi sektor yang paling kecil dalam realisasi investasi PMDN yaitu pada 2016 sebesar 2,6 milyar rupiah dibandingkan dengan total seluruh sektor 216.230,8 milyar, meningkat menjadi 87,6 milyar rupiah dibandingkan dengan total seluruh sektor 328.603,2 milyar rupiah pada 2018, lalu mengalami peningkatan kembali menjadi 564,9 milyar rupiah dibandingkan dengan total seluruh sektor 413.535,7 milyar rupiah tahun 2020.

Mengutip www.bkpm.go.id tahun 2016, 2018, 2020, Investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor perikanan juga memiliki nilai realisasi investasi sangat kecil dibandingkan sektor lainnya. Nilai investasi perikanan melalui PMA pada 2016 sebesar 43,3 juta USD dibandingkan dengan total seluruh sektor 28.964,1 juta USD, namun tahun 2018 nilai investasi justru mengalami penurunan menjadi menjadi 24,2 juta USD dibandingkan dengan total seluruh sektor 29.307,2 juta USD, lalu kembali meningkat tahun 2020 menjadi 48,1 juta USD dibandingkan dengan total seluruh sektor 28.666,0 juta USD. Hal ini membuktikan bahwa investor dalam negeri dan investor luar negeri kurang berminat untuk melakukan investasi pada sektor perikanan.

Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2020) menyatakan bahwa kendala yang dihadapi sektor perikanan dalam pembiayaan usaha adalah kurangnya informasi akses pembiayaan di sisi pelaku usaha dan minimnya informasi calon debitur potensial di sisi lembaga pembiayaan, selain itu sebagian besar pelaku usaha perikanan memiliki literasi keuangan yang masih rendah rendah dengan ketiadaan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menggambarkan kendala pada potensi pembiayaan usaha, sektor perikanan memiliki jumlah pelaku usaha yang sangat besar, mencapai 2,6 juta unit usaha, namun sebagian besar masih berjalan secara tradisional dan belum banyak memanfaatkan produk pembiayaan, baik kredit komersial maupun kredit program pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Muroyiwa *et al* (2014), informasi dan data terkait suku bunga sektor perikanan, menjelaskan bahwa sektor perikanan masih belum optimal menerapkan kebijakan suku bunga dalam rangka mengembangkan sektor industrinya. Kondisi suku bunga perbankan selama ini mengakibatkan keengganan investor untuk berinvestasi di sektor perikanan karena sektor industri perikanan di Indonesia dinilai kurang potensial dibandingkan dengan negara lainnya. Perbankan masih menganggap sektor perikanan masih menjadi sektor yang berisiko tinggi. Menurut Damayanti & Adam (2015) dalam naskah kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), beberapa faktor bank tidak tertarik untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor perikanan yaitu, pertama, risiko gagal bayar sektor perikanan relatif cukup tinggi, seperti masalah pada saat budidaya (gagal panen ikan), dan juga pada saat pemasaran (penurunan harga). Kedua, cara pembayaran bulanan model perbankan kurang sesuai dengan pendapatan pelaku usaha di sektor perikanan yang cenderung bersifat musiman (musim tangkap ikan). Ketiga, permasalahan legalitas usaha, seperti status lahan yang dimiliki pelaku usaha di sektor perikanan itu belum tersertifikasi sehingga tidak bisa dijadikan sebagai agunan (jaminan). Berkaitan dengan legalitas usaha, rata-rata usaha perikanan belum dilengkapi dengan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat izin tempat usaha (SITU). Keberadaan usaha perikanan oleh individu, kelompok, atau koperasi perikanan hanya berdasarkan SK kelompok oleh KKP, dinas, desa, atau akta notaris. Kelemahan aspek legalitas ini belum memberikan keyakinan sepenuhnya bagi perbankan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini yaitu variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap PDB Perikanan dalam jangka pendek, namun berpengaruh signifikan berkoefisien positif terhadap PDB Perikanan dalam jangka panjang. Sepanjang tahun 2011-2020 pertumbuhan inflasi masih dalam batas aman yaitu, yaitu rendah dan stabil dibawah 10%. Peningkatan inflasi sepanjang tahun 2011-2020 dapat diredam dengan tingginya permintaan terhadap produk perikanan, tercermin dari kenaikan konsumsi perikanan yang terus meningkat dari 2011-2020 seiring dengan inflasi yang dapat dikendalikan. Pertumbuhan inflasi yang stabil akan menjaga kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk perikanan, sehingga tingkat konsumsi perikanan meningkat lalu diikuti dengan PDB yang juga meningkat sepanjang tahun 2011-2020. Permintaan yang terus meningkat menyebabkan output produk perikanan meningkat dan pada akhirnya PDB Perikanan juga meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mashinini *et al.* (2019) bahwa inflasi berpengaruh terhadap PDB Agrikultur. Penelitian Salim & Ahmed (2019) juga membuktikan bahwa inflasi berpengaruh terhadap PDB.

Ristanti Akseptori. R.A. Norromadani Yuniati. Danis Maulana & Wafi Iqbal Wahyutama. *Dinamika Kebijakan Inflasi dan Suku Bunga terhadap Kinerja Perikanan Indonesia*

Variabel Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap PDB Perikanan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Hal ini tidak sejalan dengan (Boediono, 1994) bahwa tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Suku bunga kredit perbankan yang masih tergolong tinggi untuk sektor perikanan, serta kondisi sector perikanan yang masih belum optimal dalam menggunakan pembiayaan melalui kebijakan sukubunga menjadi penyebab investor masih enggan untuk melakukan investasi khususnya para investor dalam negeri dan luar negeri. Selain itu kebijakan pemerintah untuk membantu sektor usaha mikro perikanan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum dimanfaatkan dengan optimal dikarenakan penyerapan KUR sektor perikanan masih sangat kecil dibandingkan sektor usaha lain. Sehingga kurangnya pemanfaatan pembiayaan sektor perikanan melalui suku bunga menyebabkan tidak adanya pengaruh suku bunga terhadap PDB Perikanan.

Penelitian ini terbatas meneliti kebijakan moneter dari variabel inflasi dan suku bunga. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti kebijakan moneter secara menyeluruh serta dapat menambah variabel lain yang terkait secara langsung dengan sektor perikanan seperti konsumsi, impor, ekspor, dan realisasi investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Husnul (2019). Adelin, Fadila, ed. "Jenis-jenis Inflasi, Penyebab, dan Cara Menanganinya yang Perlu Diketahui". *Liputan6.com*. Diakses tanggal 2020-10-16.
- Basuki, A.T. & Prawoto, N. 2015. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Rajawali Pers. Boediono 1994. *Ekonomi Moneter*. Seri Sinop ed. Yogyakarta: BPFE.
- Bank Indonesia. (2013). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2013*.
- Budiyanti, E. (2014). *Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Sektor Industri Manufaktur Di Indonesia*. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol.5, No.2, pp.145–159
- Damayanti, M. dan Adam, L. (2015). *Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia*. Working Paper. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
- Ekananda, M. 2016. *Analisis Ekonometrika Time Series*. 2 ed. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- FAO. (2020). "The State of World Fisheries and Aquaculture 2020". Rome: Sustainability in Action.
- Howells, P., Bain, K. (1998). *The Economic of Money, Banking and Finance*. United Kingdom: Financial Times/ Prentice Hall.
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan. (2014). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2014*. <https://kkp.go.id/artikel/5106-laporan-kinerja-kkp-2014>. Diakses tanggal 5 April 2022.
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2019*. <https://kkp.go.id/artikel/19897-laporan-kinerja-kkp-2019> Diakses tanggal 5 April 2022.
- KKP (2020). *Data Indikator Kinerja Utama*. URL: <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=iku&i=8#panel-footer>, diakses tanggal 7 April 2022.
- Mankiw, N.G. 2009. *Macroeconomics*. 7 ed. New York: Worth Publisher.

- Mashinini, M.S., Dlamini, S.G. & Dlamini, D. V. 2019. The Effects of Monetary Policy on Agricultural Output in Eswatini. *International Journal of Economics and Financial Research*. 5(5), 94-99.
- Mishkin. (2016). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. New York: Pearson.
- Muroyiwa, B., Sitima, I., Sibanda, K. dan Mushunje, A. (2014). Monetary Policy Actions and Agricultural Sektor Outcomes: Empirical Evidence from South Africa. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(1), 613-620. DOI: [10.5901/mjss.2014.v5n1p613](https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n1p613)
- Natsir. (2014). *Ekonomi Moneter & Kebanksentralan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rosyidi. (2017). *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, Y.A. & Ahmed, A.F. 2019. Impact Of Monetary Policy on Agricultural Domestic Product In Iraq For The Period (1990- 2014). *Iraqi Journal of Agricultural Sciences*. 50(2), 557-566. DOI: <https://doi.org/10.36103/ijas.v2i50.656>
- Soemokaryo. (2001). *Model Ekonometrika Perikanan Indonesia*. Jakarta: Dirjen Perikanan.
- Sukirno. (2008). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tajerin. (2005). Pendugaan Dampak Kebijakan Suku Bunga Terhadap Ekonomi Makro Sektor Perikanan: Analisis Jalur Investasi Dan Ekspor Menggunakan Pendekatan Model Structural Vector Autoregression. *Jurnal Perikanan Universitas Gajah Mada*, 7(2). 135–143.